

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI DESA PINANG LAKA KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:
HARJI DIANDA
NIM. E21110009

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

E-mail: harjidianda@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014, tidak adanya laporan pertanggungjawaban dan rincian dana yang telah digunakan. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996:166) tentang faktor yang mempengaruhi yaitu :pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi (penerapan). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah belum berjalan efektif. Belum berjalannya Implementasi Kebijakan tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa itu program atau proyek sehingga masyarakat miskin masih ada yang belum tahu tentang program tersebut kemudian kurangnya sosialisasi yang konsisten sehingga pengetahuan masyarakat masih relatif dangkal mengenai program tersebut. Selain itu sumber daya mengenai fasilitas pendukung Implementasi program tersebut juga kurang memadai yang secara tidak langsung berdampak pada Implementor yang kurang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat juga bingung harus protes ke mana karena struktur birokrasi yang kompleks dan rumit sehingga mereka lebih memilih protes kedesa yang menurut mereka lebih dekat dibandingkan dengan petugas PNPM- PISEW. Sebagai solusinya dikemukakan Saran : Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan secara konsisten supaya masyarakat lebih mudah memahami dan mengetahui program tersebut. kerja sama yang baik antar petugas PNPM- PISEW dengan masyarakat sehingga jika terjadi dalam suatu pencairan dana harus dilaporkan kemasyarakat. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kata-kata kunci : Implementasi, Program PNPM- PISEW, Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan

ABSTRACT

The problem in this research is the lack of public participation, especially local communities in making decision planning and implementation of the National Program for Community Empowerment Socio-Economic Infrastructure Development of the Region in Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu in year 2014, without accountability reports and details of the funds that have been used. This research uses the theory of Jones (1996: 166) concerning factors that influence are: organizing, interpretation and application (the application). The method used is qualitative research methods. The results showed that the implementation of the National Program for Community Empowerment Infrastructure Regional Socio-Economic Development had not been effective. The implementation has not progressed is because there are many people who are less aware of what the program or project so that the poor people there who do not know about the program, and then the lack of socialization that are consistent make the community is still relatively superficial knowledge about the program. Beside that, the resources on program implementation support facilities are also inadequate, which indirectly affects the Implementor that less responsive to public complaints. This is due to the community are also confused where to protest because of the bureaucratic complex structures and complicated, so that they prefer to protest which the village they are closer than the PNPM PISEW officer. As a solution put forward suggestions: Socialization of the National Program for Community Empowerment must be done consistently so that people more easily understand and know the program. In good cooperation between officers PNPM- PISEW with the community about the disbursement of funds should be reported to the people. So the purpose of this research was to determine the factors that affect the process of implementation of the National Community for Empowerment Infrastructure Regional Socio-Economic Development program in Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keywords: Implementation, PNPM- PISEW Program, Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan



PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara berbangsa. Dalam negara ini, tidak ada permasalahan yang lebih besar, yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak dapat menggapai pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga yang menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.

Ruang lingkup PNPM- PISEW pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat :

1. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan pemukiman sosial.
2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelatihan keterampilan usaha.

Awal masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM- PISEW) di Desa Pinang Laka yaitu di mulai pada tahun 2010 sampai sekarang adapun usulan kegiatan yang dapat didanai atau diterima oleh PNPM- PISEW di Kecamatan Pengkadan untuk saat ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan usaha tani yang terdapat di Desa Pinang Laka. Karena dilihat dari pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang terdapat di Desa Pinang Laka memang cukup memprihatinkan dan layak mendapat bantuan dari PNPM- PISEW Kecamatan Pengkadan.

Masalah merupakan suatu penyimpangan dari ketidaksamaan antara apa yang diinginkan dan seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Yaitu:

Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014 dan Tidak adanya laporan pertanggung jawaban dan rincian dana yang telah digunakan.

Maka fokus penelitian ini dengan Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

(PNPM- PISEW) Tahun 2014 terutama pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM- PISEW) di Desa Pinang Laka kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014.

Manfaat penelitian ini Sebagai bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji baik segi pengembangan konsep maupun teori Implementasi serta bisa dijadikan bahan bacaan atau referensi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat juga menambah Pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada Implementasi (PNPM- PISEW).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melaksanakan kebijakan tidak semudah proses perumusan kebijakan. Di mana semua itu bergantung pada individu atau kelompok bagaimana mereka memandang serta memahaminya, karena kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep pokok dan asas yang

menjadi garis besar dalam pelaksanaan Suatu pekerjaan atau konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan sesuatu dalam kepemimpinan dan cara bertindak.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum di mana di berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Jones (1996:166) mengatakan bahwa: Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

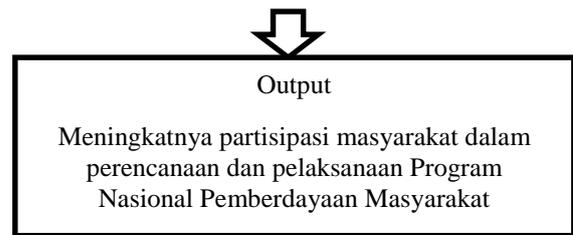
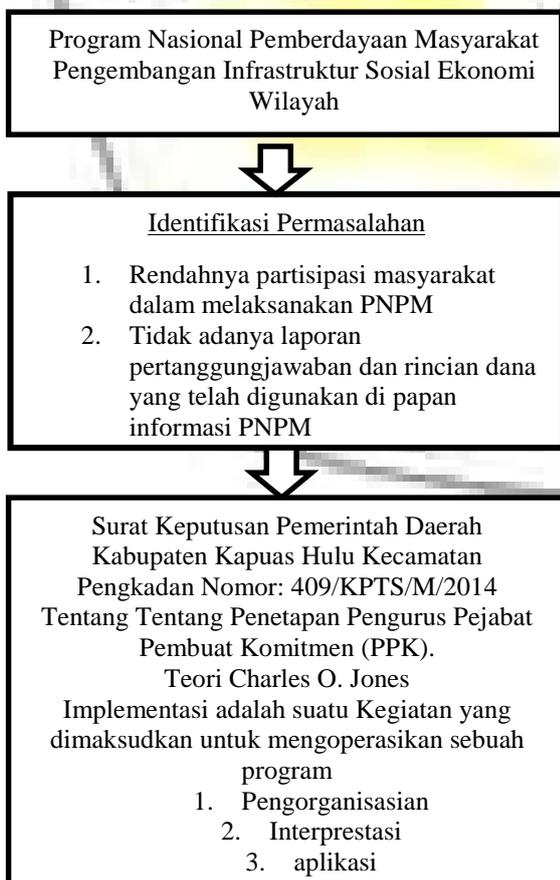
Tiga aktivitas tersebut adalah:

1. Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Pengorganisasian di sini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru bermanfaat bagi pembangunan.

2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpretasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuat kebijakan.

3. Aplikasi (Penerapan), yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan- kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya.

Kerangka pikir dalam suatu penelitian karena saling berkaitan satu sama lain, yaitu:



Gambar 1 Alur Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan Waktu penyusunan skripsi ini dilakukan dari 20 oktober 2014 sampai 03 juni 2015. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpul data sebagai dasar kesimpulan berdasarkan informasi dari subjek penelitian (Informan), penulisan langsung menanyakan suatu tujuan dari faktor-faktor Implementasi dengan pertimbangan bahwa sumber tersebut mengetahui secara pasti informasi yang penulis perlukan. Adapun subjek penelitian yang diambil di sini adalah: Ketua LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), Sekretaris LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), Bendahara LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), dan Masyarakat Desa. Selanjutnya yang dijadikan objek penelitian ini adalah Infrastruktur jalan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2014. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan. Alasannya memilih lokasi ini adalah Desa Pinang Laka dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa kualitatif, di mana data yang telah terkumpul di kelompokkan sesuai dengan klasifikasinya dan sejenisnya, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis “model interaktif” yang terdiri dari tiga komponen yaitu Reduksi, Display, dan Privikasi. Adapun untuk menguji validitas data adalah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian PNPM- PISEW

Pengembangan Infrastruktur sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Tahun 2014 masyarakat desa terutama dari masyarakat miskin merupakan sasaran dari PNPM- PISEW sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM- PISEW, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

PNPM- PISEW di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu mulai disosialisasi pada bulan April 2014 kemudian pada bulan September 2014 dibentuk organisasi, yang di mana struktur kelembagaan Desa Pinang Laka, yang menaungi tiga unit di bawahnya yaitu adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Tim Teknis Lapangan (TTL), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ketiga unit ini yang mengelola kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam PNPM- PISEW di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014.

Pembentukan organisasi ini sendiri dimulai dengan mengundang semua Tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT maupun sebagian warga yang turut menghadiri. Adapun dalam proses pemilihannya, baik Anggota PNPM- PISEW maupun koordinator ditunjuk

langsung oleh perwakilan warga yaitu para tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT. Dusun Repun warga ini juga sekaligus menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini dalam hal kondisi papan informasi PNPM-PISEW masih sangat tidak lengkap dalam menginformasikan kepada masyarakat yang dimana papan informasi sangatlah penting dimana masyarakat dapat mengetahui seberapa banyak rincian biaya dan kondisi-kondisi dalam mengelola dana, yang dimana hal itu terbalik dengan apa yang telah ada yang mana kondisinya sangatlah tidak terurus, karena jika masyarakat ingin mengetahui rincian-rincian dana yang telah dikeluarkan masyarakat harus bertanya dulu kepada PPK hal ini sangatlah tidak membantu sekali yang di mana program PNPM-PISEW adalah program yang transparansi.

2. Interpretasi PNPM- PISEW

Pemahaman berbagai dari pihak terhadap suatu kebijakan sangat penting. Terutama pemahaman yang baik oleh para implementor terhadap suatu kebijakan, karena merekalah yang akan

menyampaikan tujuan utama dari suatu kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang baik demikian diharapkan kebijakan yang dilaksanakan bisa mencapai kegiatan yang diinginkan.

Begitu juga dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2014. Berikut ini akan dibahas mengenai interpretasi para implementor terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah tahun 2014 di Kecamatan Pengkadan.

Ditegaskan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dan peningkatan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Dijelaskan bahwa sasaran PNPM-PISEW adalah rumah tangga miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan dan masyarakat miskin. Sementara itu jumlah Kepala Keluarga

Miskin di Desa Pinang Laka Berdasarkan Pendapatan PPLS 2014 yaitu 23 KK. Dapat diartikan bahwa tujuan utama dilangsungkan PNPM- PISEW adalah untuk masyarakat miskin, tentunya dengan adanya PNPM- PISEW ini diharapkan membuka akses masyarakat miskin untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya.

Sebenarnya dengan interpretasi yang sudah tepat terhadap tujuan dari PNPM- PISEW oleh Implementor LKD maka akan membantu terwujudnya Implementasi program ini dengan baik namun sayangnya belum diikuti prosedur-prosedur pelaksanaan kepada sasaran PNPM- PISEW?.

3. Aplikasi PNPM- PISEW

Penerapan merupakan tindakan nyata dalam implementasi suatu program di lapangan disertai aturan-aturan main dalam program yang dijalankan. Dalam penerapan mencakupi rutin dari kegiatan, maupun partisipasi dan lainnya sebagiannya, terkait suatu program yang dijalankan. Berikut akan dijelaskan mengenai Aplikasi/Penerapan PNPM- PISEW di Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan.

Dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM- PISEW yaitu ada dua program kegiatan yang di danai atas usulan dari masyarakat yaitu pada bidang fisik seperti infrastruktur, kemudian dana yang

diterima berdasarkan langsung dari Kantor Pembendaharaan Keuangan (KPKN) terus disalurkan melalui rekening LKDDesa Pinang Laka kemudian dana tersebut digunakan untuk membangun desa berdasarkan usulan yang diprioritaskan kepada setiap Dusun tersebut.

Dalam hal ini masyarakat masih bingung dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena keawaman masyarakat tentang maksud dan tujuan program dalam hal ini upah tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan karena disini adalah program. Karena program memiliki tujuan dan mempunyai prinsip dan mekanisme dalam pelaksanaannya, disinilah letak kurangnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat disini dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh dari program adalah ketika terdapat kebijakan management bencana, maka program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk minimalisir dampak bencana, dilaksanakan program mitigasi bencana. Mitigasi bencana tersebut dapat dipecah dalam berbagai kegiatan lain yang disebut proyek. Proyek merupakan aktivitas tertentu yang ditentukan waktunya,

lokasinya dan tujuannya atau maksudnya (anggarannya). Proyek menjelaskan suatu program yang dijabarkan secara terperinci pada sasaran tujuan. Proyek memiliki cakupan yang lebih sempit dari program, dan dikerjakan dalam jangka waktu yang terbatas. Aktivitasnya direncanakan, dengan menentukan alokasi anggaran dan lokasi geografis secara spesifik. Contoh dari proyek adalah Implementasi dari mitigasi bencana yang dilakukan, misalnya sosialisasi, pemetaan daerah rawan bencana banjir, simulasi, perkiraan kerugian akibat bencana dan sebagainya

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Pengorganisasian dalam bentuk sosialisasi ternyata masih belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh penulis bahwa masih terdapat masyarakat yang belum tau tentang PNPM- PISEW.
- b. Interpretasi dalam pelaksanaan program tersebut selalu menghambat proses implementasi secara tidak langsung juga akan menimbulkan disposisi implementor yang tidak baik.
- c. Aplikasi dalam penerapan mencakupi rutin dari kegiatan,

maupun partisipasi dan terkait suatu program yang dijalankan.

2. Saran

- a. Pengorganisasian program nasional pemberdayaan masyarakat pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah harus diadakan secara efektif supaya masyarakat mudah memahami dan mengetahui program tersebut.
- b. Interpretasi harus responsif mengenai masalah- masalah yang terjadi di dalam program tersebut, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.
- c. Penerapan dalam pelaksanaan program tersebut harus bekerja sama antar petugas sehingga tidak adanya laporan dana di papan informasi yang tidak jelas.

REFERENSI

Buku-Buku:

Dunn Wiliam N, 2000, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Ke 2*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

D, Nugroho Rian, 2003, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*, PT.Gramedia, Jakarta.

Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Net Jersey: Prentice Hall

Islamy, Irfan, 1988, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina aksara, Jakarta.

Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Gravindo Perkasa, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Nawawi, Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nurchahyo, Bagus, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Gunadarma University, Jakarta.

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab, Abdul, Solichin, 1994, *Analisis kebijakan dan Formulasi Menuju Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Askara, Jakarta.

Wibawa, Somadra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Pengkadan, Nomor 409/KPTS/M/2014

Tentang *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)*

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*.

Sumber Akademis:

Hidayat. 2010. *Implementasi Program pembangunan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Hulu Gurung kabupaten Kapuas Hulu*. Universitas Tanjungpura.

Risama Agistiasari. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak*.

Sumber Lainnya:

<http://rizalsuhardieksakta.blogspot.com/2012/06/resume-vi-analisis-data-penelitian.html> di akses tanggal 03 juni 2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Harji Dianda
NIM/ Periode Lulus : E21110009/ IV
Tanggal Lulus : 18 Juni 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP/ Ilmu Administrasi Negara
E- Mail addres/ HP : harjidianda@gmail.com / 085750912893

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika* pada Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wikayah
di Desa Pinang Laga Kecamatan Pengkadan
Kabupaten Kapuas Hulu

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, pengelola jurnal
berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database),
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan
hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

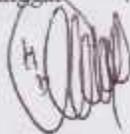
Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal Publika



Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : 25 Agustus 2015


Harji Dianda
NIM. E. 21110009

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologi*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola jurnal, berkas ini harus di Scan dalam format PDF dan dilampirkan
pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submissionauthor).